PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP PELAYANAN PERIJINAN (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso)

CLOSE SUPERVISION OF LICENSING SERVICES

(Investment Service, One Stop Integrated Service and Manpower of Bondowoso Regency)

Dicky Kurnia Ramadhan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Persoalan perijinan di Indonesia masih banyak terdapat hambatan-hambatan bagi investasi di dalam negeri. Secara umum, terdapat beberapa masalah dalam perijinan ber-usaha di indonesia. Hal tersebut salah satunya disebabkan akibat proses yang terlalu berbelit-belit dan ketidakpastian kapan terbitnya suatu perizinan tersebut. Melihat dari kondisi tersebut untuk dapat mencapai kinerja yang baik diperlukan pengendalian yang efektif dan efisien baik dari segi waktu dan penggunaan sumberdaya yang ada. Pengawasan seperti ini biasa di sebut pengawasan melekat. Pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting guna mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Dari hal tersebut Peneltian dengan judul "Pengawasan Melekat terhadap Pelayanan Perijianan" dilakukan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Pengawasan Melekat Terhadap Pelayanan Perijinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun penentuan penentuan informan menggunakan teknik *puposiv sampling*. Sedangkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti fokus dengan pelaksanaan Pengawasan Melekat Terhadap Pelayanan Perijinan. Pelaksanaan Pengawasan Melekat Terhadap Pelayanan Perijinan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien terhadap organisasi. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip pemerintah yang baik itu maka tiga pilar yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling suport dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan.

Kata Kunci : Pengawasan Melekat, Pelayanan Perjinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRACT

The issue of licensing in Indonesia is that there are still many obstacles to investment in the country. In general, there are several problems in business licensing in Indonesia. One of them is caused by a process that is too complicated and uncertainty when the issuance of a permit. Looking at these conditions to be

able to achieve good performance, effective and efficient controls are needed both in terms of time and available resource use. Such supervision is usually called inherent supervision. Supervision is a very important thing to achieve a planned goal. From this, the research entitled "Adhering Supervision of Service Services" was carried out to describe the implementation of the Supervision of the Licensing Services at the Investment Office, One-Stop Integrated Services and Bondowoso District Workers.

This study uses a descriptive qualitative approach. The determination of the determination of the informant uses the sampling technique puposiv. While collecting data through interviews, observation, and documentation. In this study the researcher focused on implementing the Supervision of Supervision of Licensing Services. The implementation of the Supervision of Supervision of Licensing Services is expected to provide an opportunity for the realization of good governance and the performance of regional governments that are effective and efficient towards the organization. By implementing the principles of good government, the three pillars, namely the government, corporations, and civil society should take care of each other, support each other and actively participate in the administration of the government that is being carried.

Keywords : Attached Supervision,Gambling Services,District One Stop Service

PENDAHULUAN

Persoalan perijinan di Indonesia masih banyak terdapat hambatan-hambatan bagi investasi di dalam negeri. Secara umum, terdapat beberapa masalah dalam perijinan ber-usaha di indonesia. Terkait hal ini perizinan di beberapa instansi pemerintahan belum menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hal ini akan memicu masalah-masalah baru, seperti pelayanan parsial dan tidak terintegrasi. Dalam proses perizinan ini masih banyak menemui kendala, sejumlah pelayanan perizinan masih dikatakan lambat dalam menerapkan suatu metode atau sistem itu sendiri. Hal ini disebabkan akibat proses yang terlalu berbelit-belit dan ketidakpastian kapan terbitnya suatu perizinan tersebut.

Banyaknya kegagalan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bermutu, responsif, dapat dipercaya dan memiliki etika pelayanan yang baik disebabkan karena sumber daya manusia itu sendiri, terutama sikap pegawai pemerintah yang berada di lini terdepan dalam memberikan pelayanan. Sikap pegawai ini dinilai sangat berpengaruh terhadap upaya perbaikan dan sertifikasi yang diinginkan suatu organisasi atau instansi. Artinya proses yang terjadi ini karena adanya perbedaan individu yang berasal dari nilai-nilai dan norma yang ingin dipertahankan dan dikelola oleh individu itu sendiri. Memahami apa yang dipikirkan seorang pegawai dan mengetahui sikap mereka, akan sangat berarti dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai suatu tujuan organsasi.

Melihat dari kondisi diatas untuk dapat mencapai kinerja yang baik diperlukan pengendalian yang efektif dan efisien baik dari segi waktu dan penggunaan sumberdaya yang ada. Pengawasan seperti ini biasa di sebut pengawasan melekat. Fungsi dari pengawasan melekat ini erat pada pejabat pimpinan yang berwenang. Dengan begitu kuatnya pengawasan melekat pada pejabat itu, maka ia wajib menyelenggarakan pengendalian yang dimaksudkan tersebut. Tanpa harus menunggu diperintah lagi, karena pejabat tersebut yang justru harus memerintah demi terwujudnya pengendalian.

Pada hakekatnya pengawasan melekat mewajibkan agar setiap atasan langsung mengetahui kegiatan nyata dari aspek serta permasalahan pelaksanaan tugas dalam lingkungan organisasi tersebut untuk selanjutnya bilamana terjadi penyimpangan dapat langsung mengambil langkah-langkah perbaikan dan tindakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat, dijelaskan bahwa pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk pengendalian aparat pemerintah di setiap instansi dan satuan organisasi dalam meningkatkan mutu kinerja di dalam lingkungan tugasnya masing masing agar tujuan instansi atau organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan melekat ini dapat terwujud melalui kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian yang dilakukan pimpinan terhadap para bawahannya.

Kantor Dinas penanaman modal, Pelayanan terpadu satu pintu dan Tenaga kerja Bondowoso ini berhubung sebagai instansi pemerintah, memiliki pegawai yang karakteristiknya cukup berbeda-beda. Perbedaan tersebutlah yang mungkin saja dipengaruhi oleh para pegawai dalam hal pengetahuan, sikap, kedisiplinan, keterampilan dan faktor lainnya. Keadaan seperti inilah yang mungkin menimbulkan perbedaan kemampuan para pegawai dalam hal melaksanakan tugasnya. Sehingga tingkat ke-efektivitasan dan efisiensi kerja pegawai akan bervariasi.

Harapan pemerintah kabupaten Bondowoso khususnya kepada instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan melekat terhadap pelayanan perizinan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien terhadap organisasi. Untuk mencapai pemerintah yang baik dalam pemerintahan maka prinsip-prinsip itu sangat penting dilakukan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip pemerintah yang baik itu maka tiga pilar yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling suport dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan.

Melihat kondisi seperti diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah khususnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja dalam menanggulangi permasalahan dalam memberikan pelayanan perijinan . Berdasarkan Penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul

skripsi “Pengawasan Melekat Terhadap Pelayanan Perijinan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bondowoso.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik wawancara dilakukan untuk penggalian data primer mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk dapat mencapai kinerja yang baik dan responsif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang dipikirkan oleh Pemerintah Kota Bondowoso adalah pelayanan dalam satu atap atau pintu yang mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi beberapa prinsip pelayanan. Prinsip-prinsip ini mampu mendorong terciptanya suasana yang kondusif di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan simpati dan atensi bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pengawasan langsung atau melekat terhadap kejelasan dan kepastian dapat dilihat dari prosedur yang diberikan oleh pihak dinas hal tersebut dimaksudkan agar usaha yang dilakukan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat.

Bentuk pengawasan yang diberikan terkait kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur pelayanan khususnya selama pandemi ini, pihak dinas memfasilitasi masyarakat dengan layanan secara *online.* Tapi sebelum itu juga sudah ada sosialisasi terkait bagaimana pengurusan administrasi secara *online* itu. Jadi masyarakat tetap bisa melakukan pengurusan surat-menyurat. Pelayanan administrasi perijinan tatap muka bisa dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat wajib mencuci tangan sebelum mengurusi izin, menjaga jarak, dan memakai masker. Aturan itu juga tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga kepada seluruh karyawan dinas.

Masyarakat sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan tentunya mendambakan pelayanan yang aman apalagi terkait soal perijinan, hal tersbut sangat diperlukan agar masyarakat dapat mempercayai sebagus apa pemerintah dalam melakukan program kinerjanya. Dengan kata lain sebagai atasan atau pimpinan yang mengawasi secara langsung jalannya suatu perijinan harus membuat masyarakat percaya akan yang dikerjakannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam keamanan mengenai informasi prosedur pelayanan Dinas penanaman modal, Pelayanan terpadu satu pintu dan Tenaga kerja Kabupaten Bondowoso sudah dijalakan dengan baik. Hal tersebut juga merupakan faktor pendorong dalam menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu

yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan dan mengetahui alasan yang dapat mempengaruhi hidup orang banyak.

Deregulasi perizininan di indonesia pasca otonomi daerah sebenarnya telah dilakukan melalui berbagi instrumen kebijakan. Namun disadari bahwa dalam tubuh birokrasi, khususnya menyangkut pelaksanaan pelayanan perijinan masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan yang secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat (dunia usaha). Beberapa kelemahan tersebut antara lain menyangkut kualitas pelayanan,pengeluaran biaya yang tidak pasti,rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan terbatasnya sarana dan prasarana.

Disamping itu masih ditemukan adanya peraturan yang tumpang tindih dan masih tercium aroma bahwa dalam setiap urusan pelayanan perijinan selalu terkait dengan praktek suap. Oleh karena itu dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kelemahan-kelemahan tersebut diatas, maka penyempurnaan pengaturan pelayanan perijinan oleh pemerintah daerah menjadi keharusan.

Pentingnya Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan melekat akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik, dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah proses pengawasan dilakukan. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan, tidak melekat pada jabatan pimpinan, tetapi juga melekat pada perencanaan yang disusun sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan. Kegiatan evaluasi dalam pengawasan melekat meliputi ketetapan sarana dan sistem kerja yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada Pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bondowoso yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi hasil dari mata kuliah akhir tahun 2021 ini.

DAFTAR PUSTAKA

Siagian, Beslina Afriani. "Analisis Kesesuaian Isi Buku Teks Bahasa Indonesia Berbasis Kurikulum 2013." (2016).

Sugiyono, 2019. Metode Penelitian : Kualitatif,Kuantitatif, dan RAD. Penerbit Alfabeta.

Sujamto, Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Supriyanto Eko dan Dra. Sugiyanti Sri. 2001. Operasionalisasi Pelayanan Prima. Jakarta: LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA